

7. Kondisi Ekonomi

Menurut data di Kelurahan terdapat laporan terdapat laporan komposisi penduduk dilihat dari segi pekerjaan dalam arsip tersebut disebutkan sampai dengan sumber tahun 2008. 215 penduduk yang tidak berkerja, 1.518 penduduk yang berkerja sebagai pedagang.

Tabel 1.8
Status mata pencaharian Penduduk Menurut Bidang
Jasa/Pedagangan

No	Status	Jumlah (Orang)
1.	Jasa Pemerintahan/ Non Pemerintahan	
	a. Pegawai Negri Sipil	2.988
	1. TNI/Polri	1.518
	2. Bidan	2
	3. Lain-lain	14.000
	b. Pegawai Swasta	2.141
	b. Pensiun Swasta	100
2.	Jasa Lembaga Keuangan	
	a. Perbankan	1
	b. Koperasi	2
3.	Jasa Perdagangan	
	a. Pasar Desa / Kelurahan	2
	b. Warung	175
	c. Toko	123
4.	Jasa Penginapan	
	a. Kost	85

- c. Program Pemberdayaan lingkungan sarana dan prasarana, yaitu membangun jalan pavingisasi, perbaikan rumah yang tak layak dan Perbaikan selokan yang rusak.

Sedangkan program penanggulangan kemiskinan yang dinilai gagal dalam melaksanakannya adalah *pertama*, pembagian beras miskin, program ini tidak dilaksanakan dikarenakan pelayanannya tidak merata atau bantuannya tidak merata dari penduduk miskin yang ada di Kelurahan Perak Utara. *Kedua*, program pendidikan yang berupa bantuan perlengkapan sekolah warga masyarakat miskin yang tidak mampu membeli alat-alat perlengkapan sekolah anaknya, program ini tidak dilakukan oleh pemerintah dalam program penanggulangan kemiskinan di karenaka banyak warga yang menyingkinkan bantuan tersebut atau banyak warga yang mengaku miskin. *Ketiga*, yaitu program pemberdayaan ekonomi berupa mendirikan koperasi warga, program ini masih belum dijalankan karena ada beberapa dampak terutama pada dana yang dibutuhkan tidak mencukupi, karena program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan di setiap Kelurahan hanya mendapatkan dana yang minim, dikarena APBD semakin menurun. Dibandingkan pada tahun yang lalu. *keempa*, program pemberdayaan lingkungan seperti pengelolaan sampah basah.

Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan perkotaaan yang dilakukan Bappeko adalah sebagai berikut :

1. Program Penguatan, program penguatan P2KP atau PNPM dialokasikan pada sejumlah Desa/Kelurahan yang telah mendapatkan program PNPM

- Mandiri. Program penguatan antara lain adalah pelatihan UPK, membentuk forum UPK Kabupaten atau kota
2. Manajemen Program. Pengelolah program P2KP atau PNPM Mandiri yang dilakukan Bappeko dilaksanakan dengan mekanisme kegiatan yang memungkinkan terlaksananya prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, demokratis, prioritas, dan berkelanjutan serta prinsip lainnya sebagaimana diuraikan dalam ketentuan dasar pelaksanaan.
 3. Bantuan Dana, Bantuan dana diberikan dalam bentuk dana BLM (bantuan langsung masyarakat). BLM ini bersifat stimulant dan sengaja disediakan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berlatih dengan mencoba melaksanakan sebagian rencana kegiatan penanggulangan kemiskinan yang telah direncanakan pada tahun pertama.
 4. Bantuan Pendamping, kegiatan pendampingan dilaksanakan guna memfasilitasi program sehingga dapat berjalan secara optimal sesuai dengan mekanisme kegiatan mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban, sampai dengan pelestarian program. Pendampingan ini dilakukan untuk mendampingi masyarakat dalam program penanggulangan kemiskinan
 5. Sistem dan Mekanisme monitoring dan evaluasi, Monitoring pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Bappeko yaitu melakukan pemantauan dilapangan, melakukan penilaian sekaligus menyusun tindakan perbaikan.

Pelaksanaan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang disusun oleh PNPM Mandiri yang dilakukan Bappeko dalam melakukan program penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Perak Utara, Kabupaten Surabaya. Yaitu melakukan cara menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, baik pemerintah pusat, daerah dan swasta maupun lembaga yang bergerak dalam bidang sosial. Kemitraan (kerjasama) yang dijalin dalam bentuk : memberi bantuan makanan gizi, penyediaan pelatihan menjahit untuk menciptakan kerjasama dan kemitraan usaha yang didukung oleh organisasi masyarakat setempat, pemerintah daerah, dan swasta, penyediaan lingkungan prasarana dan sarana.

Dalam program yang telah dilaksanakan ini, telah melakukan pendampingan yaitu dengan melakukan pelatihan, seminar, dan dialog. Selama melaksanakan pemberdayaan lingkungan seperti penyediaan prasarana rumah tangga miskin rentan dan lingkungannya, pihak dari Bappeko mengenai PNPM Mandiri bertugas memantau dan mengawasi lokasi pembangunan tersebut. ini untuk memastikan bahwa petugas benar-benar melakukan tugasnya dengan baik, dan ada sekiranya ada beberapa kekurangan dalam pelaksanaan program tersebut dikarenakan kurang adanya pendampingan maupun kurang efektifnya bappeko dalam melakukan program tersebut.

Masyarakat miskin diberikan pemahaman juga diberikan penyadaran bahwa akan mempunyai kemampuan untuk keluar dari kemiskinan. Masyarakat miskin diberikan pelatihan-pelatihan dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan life skill. Masyarakat miskin di Kelurahan Perak Utara

diberikan peluang yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki partisipatif aktif dan berkelanjutan yang di tempuh dengan memberikan peran yang lebih besar.

Kendala-kendala yang dihadapi program ini adalah pemerintah daerah harus dilibatkan secara intensif dalam setiap pelaksanaan dalam program penanggulangan kemiskinan, monitoring dan evaluasinya yang dilakukan bappeko kurang efektif di masyarakat Perak Utara.

Dalam pemberdayaan masyarakat miskin sangat diperlukan partisipasinya sebagai kekuatan dinamisasi. Memberdayakan masyarakat dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan harus mampu meningkatkan partisipasi dan rasa memiliki terhadap program yang dilaksanakan. Dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan bukanlah jumlah bantuan saja tetapi yang diutamakan adalah bagaimana menggerakkan partisipasi masyarakat sehingga menciptakan pembangunan yang berbasisi kepada masyarakat.

Dari temuan tersebut akan dianalisis serta dikonfirmasi dengan teori yang sudah ada di BAB II : Kajian pustaka, yang telah digambarkan secara panjang dan lebar tentang teori-teori yang ada. Dalam temuan tersebut menggambarkan bahwa program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Bappeko dengan cara penyediaan program-program seperti program P2KP, program yang berupa

Pelayanan kesehatan, pelayanan ekonomi seperti pelatihan keterampilan, pelayanan lingkungan seperti perbaikan rumah yang tak layak yang terakhir

penyediaan beras miskin bagi masyarakat miskin. Dan masih banyak lagi program yang dilakukannya

Dengan masih banyaknya orang-orang yang berada dalam tingkat prasejahtera ini menandakan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Bappeko masih kurang optimal. Banyak program yang dilakukannya gagal atau tidak dijalankan seperti program penanggulangan kemiskinan yang tidak berjalan yaitu bantuan pendidikan bagi masyarakat miskin,. Sedangkan program ekonominya yang tidak berjalan adalah bantuan beras miskin, yang penyediaannya tidak merata hanya sebagian warga yang mendapatkan bantuan tersebut.

Dalam hal ini, Merupakan sebuah bentuk teori Kemiskinan struktural yang memandang kemiskinan yang di sebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia, yaitu seperti kebijakan perekonomian yang tidak adil, distribusi aset produksi yang tidak merata, korupsi dan kolusi serta tatanan ekonomi dunia cenderung menguntungkan kelompok masyarakat tertentu. Selanjutnya sumodinigrat mengatakan bahwa munculnya kemiskinan struktural disebabkan berupaya menanggulangi kemiskinan natural, yaitu dengan direncanakan bermacam-macam program dan kebijakan. Namun karena pelaksanaan tidak seimbang, pemilikan sumber daya tidak merata, sehingga menimbulkan struktural masyarakat yang timpang. Menurut kartasimita hal ini disebut "*accidental poverty*" yaitu kemiskinan karena dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan merupakan sebuah keteraturan dimana mereka merasa bahwa mereka diciptakan oleh Allah mempunyai kelebihan materi sehingga mereka berbagi dengan masyarakat lain yang membutuhkan, dengan melihat fungsi mereka sebagai orang-orang kaya yang mempunyai kewajiban untuk membantu orang-orang yang sedang dalam kesusuahan.